

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA
STUDI PADA DESA DI KECAMATAN BALIK BUKIT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

(Skripsi)

Oleh :

KRISTIANUS BOBII

NPM 2211031060



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA
STUDI PADA DESA DI KECAMATAN BALIK BUKIT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**Oleh
KRISTIANUS BOBII**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Studi Pada Desa Di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

Oleh:

Kristianus Bobii

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan dana desa, sehingga berpotensi memengaruhi kinerja pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengiriman kuesioner kepada aparatur desa. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan regresi linier berganda yang didukung oleh uji validitas, uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa, sedangkan transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif namun tidak signifikan. Selain itu, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan dana desa lebih dipengaruhi oleh akuntabilitas, sementara transparansi dan partisipasi masyarakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kinerja Pengelolaan Dana Desa.

ABSTRACT

The Influence of Accountability, Transparency and Community Participation on the Performance of Village Fund Management Study in Villages in Balik Bukit District, West Lampung Regency

By:

Kristianus Bobii

This research is motivated by the lack of optimal application of good governance principles in village fund management, so that it has the potential to affect the performance of village fund management. Therefore, this study aims to analyze the influence of accountability, transparency, and community participation on the performance of village fund management in villages in Balik Bukit District, West Lampung Regency. This study uses a quantitative approach with data collection techniques through sending questionnaires to village officials. Furthermore, the data was analyzed using multiple linear regression supported by validity tests, reliability tests, and classical assumption tests. The results of the study show that accountability has a positive and significant effect on the performance of village fund management, while transparency and community participation have a positive but insignificant effect. In addition, simultaneously these three variables affect the performance of village fund management. Based on these results, it can be concluded that the performance of village fund management is more influenced by accountability, while transparency and community participation have not been able to have a significant influence.

Keywords: Accountability, Transparency, Community Participation, Village Fund Management Performance.

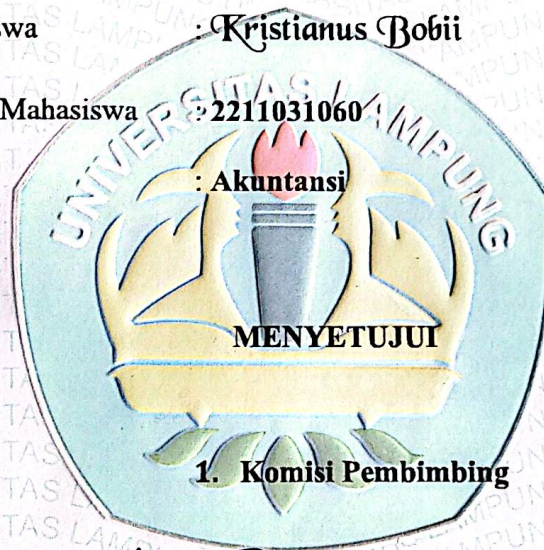
LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Studi Pada Desa Di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat**

Nama Mahasiswa : **Kristianus Bobii**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2211031060**

Jurusan : **Akuntansi**



1. Komisi Pembimbing

an

Dr. Lego Waspodo, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIP. 19790122 200912 1001

2. Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.

NIP 19700801 199512 2001

MENGESAHKAN

1. Tim penguji

Ketua : Dr. Lego Waspodo, S.E., M.Si., Ak., CA.

an Dules:
.....

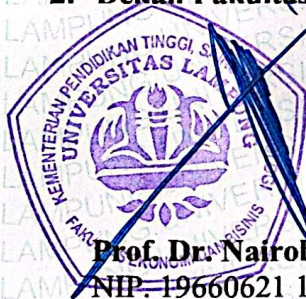
Penguji Utama : Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.

Rogu

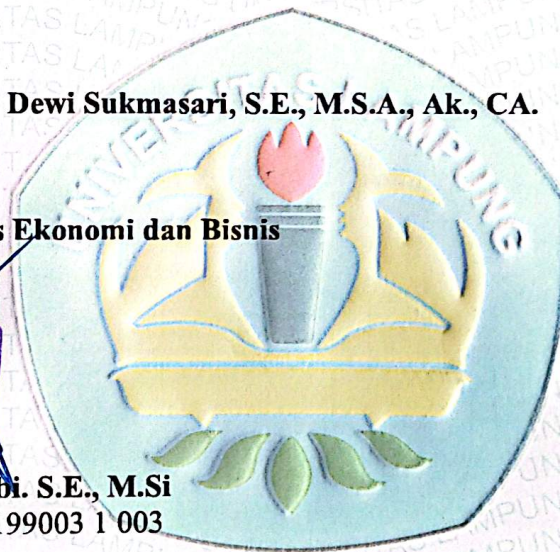
Penguji Kedua : Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., Ak., CA.

(DWE²⁶)
.....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi. S.E., M.Si
NIP. 19660621 199003 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Mey 2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kristianus Bobii

NPM : 2211031060

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi penelitian saya yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Studi Pada Desa Di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, dari karya ilmiah orang lain. Seluruh sumber yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini telah dicantumkan secara jelas sesuai dengan kaidah dan etika penulisan ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya unsur plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima segala bentuk sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Bandar Lampung, 1 Juni 2026

Penulis



Kristianus Bobi

RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini bernama Kristianus Bobii, lahir di Ikebo, distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah pada 04 Desember 2004 sebagai Anak Ketiga dari lima bersaudara yang merupakan putra dari Bapak Isak Bobii dan Ibu Dorkas Tebai. Penulis Menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SD YPPK Santo Yosep Moanemani pada tahun 2010-2016, Selanjutnya melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP YPPK Santo Fransiskus Moanemani pada tahun 2016-2019. Kemudian Penulis Menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA N 2 Dogiyai, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial pada tahun 2019-2022. Penulis merupakan mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, yang menempuh pendidikan melalui jalur Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Papua. Selama masa studinya, penulis aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dan gerakan sosial, di antaranya sebagai anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung periode 2024/2025, anggota aktif Ikatan Mahasiswa Papua Lampung (IKMAPAL), serta dipercaya menjabat sebagai Ketua IKMAPAL pada tahun 2024. Selain itu, penulis juga pernah menjadi anggota aktif Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dengan amanah di Biro Pergerakan. Dalam lingkup pengembangan intelektual dan advokasi, penulis merupakan salah satu pendiri serta penggagas Forum Mahasiswa Afirmasi Adik Papua dan 3T di Universitas Lampung, serta turut berperan sebagai Badan Penasihat Organisasi Komunitas Mahasiswa Papua se-Sumatera (KOMPASS). Di bidang non-akademik, penulis juga meraih prestasi sebagai Juara I lomba hip-hop dalam kegiatan Seminar dan Natal IPMANAPANDODE se-Jawa dan Bali.

MOTTO

"Segala perkara dapat kutanggung didalam Dia,
yang memberi kekuatan kepadaku"

– *Filipi 4:13*

"Walaupun terlahir bukan dari kedua orang tua yang mempunyai gelar sarjana,
tapi Puji Tuhan saya bisa menjadi sarjana"

"Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang yah!"

"Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah"

– *Bayu Hamka*

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan aku panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan skripsi ini melalui segala bentuk kemudahan yang telah diberikan-Nya, walaupun dikerjakan sembari mengeluh tetap saja aku berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, serta tak lupa kupersembahkan hasil kuliah 8 semester ini untuk orang-orang hebat yang selalu

disebutkan dalam doa:

Ayah dan Ibu yang luar biasa
(Isak Bobii dan Dorkas Tebai)

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ayah dan Ibu atas doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti. Saya juga sangat bersyukur kepada kakak-kakak tercinta, Paskalis Bobii, Almarhumah Selpina Bobii, Maria Bobii, dan Almarhum Yanto Bobii, yang telah membimbing dan menjadi teladan dalam perjalanan hidup saya.

Ucapan terima kasih turut Penulis sampaikan kepada adik-adik tersayang, Rita Bobii dan Paulus Bobii, yang selalu menjadi sumber semangat dan motivasi bagi saya untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Studi Pada Desa Di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

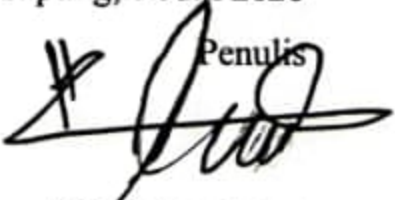
Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang berperan penting dan telah memberikan bantuan serta dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Lego Waspodo, SE., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati meluangkan waktu untuk memberikan arahan, koreksi, dan masukan berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak. ,dan Ibu Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A Ak., CA. selaku dosen pembahas yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun, membantu penulis dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam skripsi ini.
5. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing akademik yang sudah memberikan banyak masukan serta

- bantuan selama menjalani perkuliahan dari semester awal hingga semester akhir ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membagikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
 7. Para Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah memberikan banyak bantuan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
 8. Kedua orang tua tersayang, Ibu dan Bapak, terima kasih yang mendalam atas segala dukungan, kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih karena telah menjadi orang tua yang hebat dan dapat selalu dibanggakan. Abang dan kakak-kakakku serta adik yang terkasih, terima kasih atas dukungan kalian dalam bentuk apapun yang membantu penulis menjalani perkuliahan dengan lancar.
 9. Teman-teman seperjuangan khususnya Rohani, Andika, Asti, Ilham, Shintya dan Abdillah serta semua teman se-angkatan, sebagai sumber informasi selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala arahan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 10. Teruntuk Kekasihku Ancelina Rika Kotouki yang selalu bersedia menampung semua keluhan penulis serta memberikan saran dan semangat yang sangat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.
 11. Seluruh pihak lainnya, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas seluruh bantuan, doa, serta dukungan yang diberikan, baik besar maupun kecil. Hal tersebut sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk memperbaiki segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Bandar Lampung, 1 Juni 2026

Penulis

Kristianus Bobii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
11.1. Latar Belakang.....	1
11.2. Rumusan Masalah.....	9
11.3. Tujuan Penelitian	9
11.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)	11
2.1.2 Akuntabilitas	12
2.1.3 Transparansi	13
2.1.4 Partisipasi	14
2.1.5 Kinerja Pengelolaan Dana Desa.....	16
2.2 Penelitian Terdahulu	17
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	22
2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian	22
2.4.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja	

pengelolaan Dana Desa	22
2.4.2 Pengaruh Tranparansi terhadap kinerja Pengelolaan Dana Desa	24
2.4.3 Pengaruh Partisipasi terhadap kinerja Pengelolaan Dana Desa	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	28
3.2.1 Populasi Penelitian	28
3.2.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	29
3.3 Jenis dan Sumber Data	29
3.4 Metode Pengumpulan Data	30
3.4.1 Kuesioner	30
3.4.2 Penentuan Skor	30
3.5 Operasional Variabel	33
3.6 Teknik Analisis Data	35
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif	35
3.6.2 Uji Reliabilitas	35
3.6.3 Uji Validitas	36
3.6.4 Uji Asumsi Klasik	36
3.6.5 Analisis Regresi Linier Berganda	38
3.6.6 Uji Hipotesis	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Gambaran Umum	42
4.1.1 Hasil Pengiriman Kuesioner	43
4.2 Hasil Deskriptif Data	44
4.3 Hasil Uji Kualitas Data	46
4.3.1 Uji Reliabilitas	46
4.3.2 Uji Validitas	47
4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	49
4.4.1 Uji Normalitas	49
4.4.2 Uji Multikolinearitas	51
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas	53
4.5 Analisis Regresi Linier Berganda	55

4.5.1 Uji Parsial (t).....	55
4.5.2 Uji Simultan (F).....	57
4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	58
4.6 PEMBAHASAN.....	59
4.6.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa	59
4.6.2 Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa	60
4.6.3 Pengaruh Partisipasi terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa	61
BAB V PENUTUP	62
5.1. KESIMPULAN.....	62
5.2. KETERBATASAN.....	63
5.3. SARAN.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3.4.1 Skor Skala Likert.....	31
Tabel 3.4.2 Rating Skala	32
Tabel 3.5.1 Devinisi Operasional	33
Tabel 4.2 Distribusi Penyebaran Kuesioner	43
Tabel 4.3 Data Sampel Penelitian	44
Tabel 4.4 Deskriptif Statistik.....	44
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas	46
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas.....	50
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas	52
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas	54
Tabel 4.10 Tabel Uji Parsial (t).....	56
Tabel 4.11 Uji Simultan (f)	58
Tabel 4.12 Koefisien Determinasi.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir.....22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan dana desa yaitu instrumen ketetapan fiskal pemerintah yang memiliki peran strategis guna mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dengan alokasi dana desa yang berasal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah berupaya memperkuat kemandirian desa serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks akademik dan praktis, pengelolaan dana desa tidak hanya menuntut efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga menekankan pentingnya implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat.

Namun demikian, berbagai fenomena empiris menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa masih menghadapi sejumlah permasalahan yang signifikan. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2023 menunjukkan masih terdapat kekurangan pada aspek merencanakan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan keuangan desa. Kondisi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga tercermin dalam kasus di lapangan, seperti dugaan penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Lampung Barat yang mencakup indikasi program fiktif dan ketidaksesuaian realisasi anggaran. Fenomena ini menunjukkan adanya kontradiksi antara tujuan pengelolaan dana desa yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan praktik yang masih berpotensi menyimpang.

Secara ideal, mengelola dana desa seharusnya dilakukan dengan transparan, akuntabel, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap

tahap pengelolaan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar pada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengatasi adanya penyimpangan untuk pemakaian dana. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda, di mana keterbukaan informasi belum sepenuhnya dilaksanakan dan masyarakat belum dilibatkan secara optimal dalam proses pengawasan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara konsep normatif *good governance* dengan implementasi yang terjadi di tingkat desa.

Kesenjangan tersebut juga terlihat secara lebih spesifik di Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, yang merupakan pusat pemerintahan daerah dengan dinamika pembangunan desa yang cukup tinggi. Meskipun secara struktural wilayah ini memiliki potensi dalam pengelolaan dana desa yang baik, pada praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan, kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi anggaran kepada masyarakat, serta rendahnya tingkat kontribusi masyarakat pada tahapan peninjauan pembangunan. Bahkan, terdapat indikasi penyimpangan dalam mengelola anggaran desa di wilayah Kabupaten Lampung Barat memperkuat bahwa implementasi prinsip *good governance* belum berfungsi dengan maksimal.

Berbagai penelitian terdahulu juga menguatkan adanya permasalahan pada tata kelola keuangan desa. Penelitian Kurniawan (2020) serta Pratama (2021) menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama yang memberikan pengaruh kualitas mengelola dana desa. Selain itu, penelitian Maria & Halim (2021) serta Shidqi & Arfiansyah (2025) menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan dan fungsi pengawasan internal dapat menekan potensi penyimpangan dan praktik korupsi. Fakta lain dari Indonesia Corruption Watch tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor desa menjadi salah satu sektor paling rawan terhadap praktik korupsi, yang menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas dan transparansi masih menjadi kebutuhan yang mendesak.

Permasalahan tersebut memperlihatkan jika mengelola anggaran desa tidak hanya berhubungan pada aspek administratif, namun juga termasuk kualitas kinerja pemerintah desa dalam mengelola sumber daya keuangan publik. Di satu sisi, anggaran desa diinginkan bisa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan yang tepat sasaran. Namun di sisi lain, masih terdapat potensi penyimpangan, keterlambatan pelaporan, serta rendahnya keterlibatan masyarakat yang justru menghambat tercapainya tujuan tersebut. Kondisi ini memperlihatkan adanya kontradiksi antara harapan kebijakan dengan realisasi di lapangan.

Studi ini menjadi perlu dalam dilaksanakan dikarenakan mempunyai urgensi baik secara akademik ataupun praktis. Dengan akademik, studi berikut diinginkan mampu berkontribusi pada pengembangan literatur terkait tata kelola keuangan publik di tingkat desa. Secara praktis, temuan studi berikut diinginkan mampu menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah desa guna memperbaiki sistem pengelolaan anggaran desa, terkhususnya guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai upaya pencegahan penyimpangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, fokus utama pada studi berikut yakni mengkaji dampak akuntabilitas, transparansi, serta kontribusi masyarakat pada kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Ketiga variabel tersebut diketahui selaku bagian penting guna mewujudkan untuk perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang baik serta meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran desa. Maka, studi berikut diinginkan mampu menjelaskan empiris mengenai ikatan pada prinsip good governance dengan kinerja mengelola dana desa, khususnya dalam menjawab kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas yang terjadi di lapangan.

Akuntabilitas yaitu aspek fundamental pada tata kelola keuangan publik yang mengfokuskan tanggung jawab pemerintah guna mempertanggungjawabkan setiap pemakaian sumber daya kepada masyarakat sebagai pemegang

kedaulatan. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas tidak hanya termasuk faktor administratif berupa pelaporan keuangan, namun juga mencerminkan tanggung jawab moral untuk menyakinkan jika setiap program dan aktivitas yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Akuntabilitas yang baik dilaksanakan dengan menampilkan laporan yang transparan, bisa diakses, serta sesuai dengan ketentuan aturan undang-undang yang berlaku. Namun, akuntabilitas juga berguna selaku mekanisme kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Maka, bertambah tinggi tingkat akuntabilitas yang diimplementasikan, bertambah besar pula kesempatan adanya mengelola anggaran desa yang efisien, efektif, serta tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan pandangan jika akuntabilitas publik yaitu instrumen penting guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa (Mardiasmo, 2021).

Meskipun dengan konseptual akuntabilitas telah menjadi prinsip yang diakui secara luas, implementasinya di tingkat desa masih mengatasi banyak kendala yang sesuai. Berbagai temuan empiris memperlihatkan jika masih adanya desa yang belum bisa menyusun laporan keuangan dengan tepat waktu serta sesuai standar yang ditetapkan. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya pengertian terhadap sistem akuntansi desa, serta lemahnya pengawasan internal menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut. Selain itu, praktik akuntabilitas yang dilakukan sering kali masih bersifat formalitas administratif tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas kinerja program. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal akuntabilitas dengan realisasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem akuntabilitas yang tidak hanya mengarah terhadap kepatuhan, tetapi juga terhadap pencapaian hasil yang optimal (N. I. Sari et al., 2022).

Sejumlah studi terdahulu memperlihatkan jika akuntabilitas mempunyai pengaruh signifikan pada kinerja pengelolaan anggaran desa. Penelitian oleh Rahman & Rahcman (2021) menegaskan jika akuntabilitas berkontribusi positif pada peningkatan efektivitas mengelola keuangan desa melalui peningkatan kualitas pelaporan dan pengawasan. Hasil serupa dikemukakan oleh (Prasetyo, 2023)

yang menyatakan bahwa akuntabilitas bisa dalam peningkatan keyakinan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang akhirnya berpengaruh terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat pada pembangunan. Selain itu, penelitian oleh Nugroho et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas yang baik dapat meminimalkan potensi penyimpangan penggunaan dana desa. Temuan-temuan tersebut memperkuat bahwa akuntabilitas yaitu variabel penting guna menentukan keberhasilan mengelola keuangan desa. Dengan demikian, peningkatan akuntabilitas menjadi salah satu langkah strategis dalam memperbaiki kinerja pemerintah desa.

Namun demikian, tidak semua penelitian memperlihatkan temuan yang konsisten mengenai dampak akuntabilitas pada kinerja mengelola dana desa. Studi oleh Wulandari (2021) memperlihatkan jika akuntabilitas tidak selalu berpengaruh positif terhadap kinerja, terutama ketika implementasinya hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif. Dalam kondisi tersebut, aparatur desa cenderung lebih mengutamakan kelengkapan dokumen dibandingkan dengan kualitas pelaksanaan program. Hal ini mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara laporan yang disajikan dengan kondisi riil di lapangan. Fenomena ini memperlihatkan jika akuntabilitas yang mempunyai sifat formal belum tentu bisa dalam peningkatan kinerja secara substansial. Maka, dibutuhkan pendekatan yang lebih lengkap untuk mengimplementasikan akuntabilitas agar memberikan dampak nyata terhadap kinerja mengelola dana desa.

Transparansi yaitu dasar penting lainnya pada tata kelola pemerintahan yang baik yang mengfokuskan keterbukaan informasi terhadap publik. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang sesuai, relevan, serta tepat waktu terkait mengelola keuangan desa. Pada bagian dana desa, transparansi menjadi sarana untuk membangun kepercayaan masyarakat serta mendukung adanya peninjauan publik yang efisien. Pemerintah desa yang transparan cenderung memiliki tingkat legitimasi yang lebih tinggi di mata masyarakat. Selain itu, transparansi juga berguna selaku alat mencegah terhadap terapan korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Maka, penerapan transparansi

yang optimal menjadi utama untuk peningkatan kualitas mengelola dana desa (Fitriani, 2022).

Berbagai penelitian memperlihatkan jika kejelasan mempunyai dampak positif pada kinerja mengelola dana desa. Studi oleh Lihawa et al. (2025) menyatakan jika keterbukaan informasi dalam penyusunan dan pelaporan keuangan desa mampu dalam peningkatan efektivitas mengelola anggaran. Hasil serupa dikemukakan oleh Asrul (2024) menunjukkan bahwa transparansi berkontribusi terhadap peningkatan akurasi penggunaan anggaran. Selain itu, Ismail (2023) menemukan bahwa transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang berdampak pada peningkatan partisipasi dalam pengawasan. Penelitian lain oleh Aditya (2022) juga menegaskan jika kejelasan berdampak relevan pada kualitas kinerja aparatur desa. Temuan berikut menyatakan jika kejelasan yaitu faktor penting untuk peningkatan kinerja mengelola anggaran desa.

Tetapi, adanya pula studi yang memperlihatkan temuan yang berbeda terkait pengaruh transparansi. Yudastio & Azriya (2022) menegaskan jika transparansi tidak memiliki dampak relevan dalam mengelola anggaran desa. Hal berikut disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi yang diinformasikan oleh pemerintah desa. Selain itu, keterbukaan informasi yang dilakukan sering kali tidak diikuti dengan upaya edukasi kepada masyarakat. Akibatnya, informasi yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal dalam proses pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi yang tidak didukung oleh partisipasi aktif masyarakat tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, transparansi perlu diintegrasikan dengan peningkatan kapasitas masyarakat agar lebih efektif.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan mengelola anggaran desa. Kontribusi memperlihatkan keikutsertaan aktif masyarakat pada tahapan merencanakan, melaksanakan, hingga evaluasi program pembangunan. Bertambah tinggi jenjang kontribusi masyarakat, bertambah besar kesempatan terciptanya peninjauan sosial yang efisien. Namun, partisipasi juga memungkinkan program yang dilaksanakan lebih selaras pada

keperluan masyarakat. Dengan adanya partisipasi yang kuat, pemerintah desa dapat memperoleh masukan yang konstruktif dalam pengambilan keputusan. Hal berikut memperlihatkan jika kontribusi masyarakat mempunyai peran strategis untuk peningkatan kinerja mengelola anggaran desa (Utami, 2024).

Sejumlah penelitian menunjukkan jika kontribusi masyarakat berdampak positif pada kinerja mengelola anggaran desa. Studi oleh Sihotang et al. (2024) memperlihatkan jika kontribusi masyarakat meningkatkan kualitas perencanaan anggaran desa. Selain itu, Aisyah & Irham (2022) serta Lestari (2023) menemukan bahwa partisipasi dalam musyawarah desa mampu meningkatkan transparansi dan keefektifan mengelola anggaran. Studi oleh Muttaqin (2025) memperlihatkan jika kontribusi masyarakat berdampak relevan pada peningkatan kepercayaan publik. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi yaitu aspek utama dalam mendukung keberhasilan tata kelola keuangan desa. Maka, peningkatan kontribusi masyarakat menjadi salah satu strategi untuk memperbaiki kinerja mengelola anggaran desa.

Walaupun, terdapat pula studi yang menunjukkan jika kontribusi masyarakat tidak selalu berdampak relevan pada kinerja mengelola anggaran desa. Studi oleh Yanto & Aqfir (2020) memperlihatkan jika kontribusi masyarakat masih bersifat simbolis dan belum memberikan dampak nyata. Hal berikut dikarenakan oleh minimnya tingkat pendidikan masyarakat serta keterbatasan akses informasi. Selain itu, budaya birokrasi yang masih bersifat top-down juga menghambat keterlibatan masyarakat secara aktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi yang tidak berkualitas tidak akan memberikan kontribusi yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat agar partisipasi yang dilakukan lebih bermakna.

Fenomena di Kabupaten Lampung Barat menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai tantangan yang berhubungan pada akuntabilitas, transparansi, serta kontribusi masyarakat. Beberapa kasus memperlihatkan adanya keterlambatan pelaporan, kurangnya keterbukaan informasi, serta minimnya keterlibatan masyarakat pada peninjauan. Kondisi

berikut mencerminkan bahwa implementasi aspek good governance belum berfungsi dengan maksimal. Selain itu, temuan dari lembaga pengawas menunjukkan masih adanya potensi penyimpangan dalam mengelola anggaran desa. Hal berikut memperlihatkan terdapat kesenjangan pada kondisi ideal dengan praktik di lapangan. Maka, dibutuhkan kajian empiris dalam mengerti faktor-faktor yang memberikan pengaruh keadaan tersebut.

Studi ini menjadi penting dilakukan karena memiliki urgensi yang tinggi baik dengan akademik ataupun praktis. Diharapkan studi ini akan memberikan kontribusi akademis pada pengetahuan tentang tata kelola keuangan desa, khususnya terkait dampak akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat. Secara praktis, diharapkan temuan-temuan tersebut akan digunakan oleh pemerintah desa sebagai bahan penilaian untuk meningkatkan standar administrasi keuangan desa. Selain itu, diharapkan studi ini akan menawarkan saran kebijakan yang relevan bagi pemerintah daerah. Hasilnya, studi ini secara signifikan memajukan inisiatif untuk meningkatkan standar tata kelola keuangan desa.

Studi berikut mempunyai tujuan dalam mengkaji dampak keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan keterbukaan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Karena ketiga faktor ini sangat penting dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, maka ketiganya dipilih. Selain itu, penelitian ini juga mencari perbedaan antara gagasan teoritis dan aplikasi praktis. Oleh karena itu, diharapkan temuan studi ini akan memberikan ringkasan menyeluruh terkait variabel-variabel yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang tersebut, dibentuk rumusan masalah yaitu:

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap kinerja Pengelolaan dana desa?
3. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap kinerja Pengelolaan dana desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah tersebut, tujuan studi ini antara lain:

1. Menganalisis Pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa.
2. Menganalisis Pengaruh Transparansi terhadap kinerja pengelolaan dana desa.
3. Menganalisis Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada setiap proyek penelitian akan memberikan temuan yang diharapkan bermanfaat untuk para peneliti dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah keuntungan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Studi berikut mempunyai tujuan menambah pengetahuan dalam akuntansi publik, khususnya terkait mengelola anggaran desa. Fokusnya pada dampak akuntabilitas, transparansi, serta kontribusi pada kinerja mengelola anggaran desa, serta peran prinsip Good Governance untuk peningkatan efektivitas. Selain itu, studi berikut memberi bukti empiris dan menawarkan model analisis yang menggabungkan ketiga variabel tersebut untuk menjelaskan perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya. Hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian akuntansi publik, kebijakan, dan pembangunan desa di tingkat lokal maupun nasional.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Penulis

Studi ini bisa memberi tambahan informasi, perspektif, serta pengalaman dalam dunia akuntansi publik, terutama mengenai pengelolaan keuangan desa yang seharusnya bertanggung jawab, jelas, dan melibatkan masyarakat. Selain itu, studi ini juga bisa dalam peningkatan kemampuan analisis kritis terhadap isu-isu nyata dalam konteks pemerintah desa.

b. Untuk Pemerintah Desa dan Daerah

Studi ini bisa dipakai selaku alat evaluasi dan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa dan juga memberi saran praktis bagi perangkat desa dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana dan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

c. Bagi Masyarakat

Studi ini mampu memberikan wawasan mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi serta terkait pada penentuan keputusan berhubungan pada pemakaian anggaran desa, sehingga dapat mendorong keterkaitan aktif mereka dalam pembangunan dan menciptakan pemerintahan desa yang lebih transparan.

d. Peneliti Selanjutnya

Temuan pada studi berikut bisa berfungsi selaku acuan serta perbandingan untuk melakukan studi serupa dengan objek, variabel, atau metode yang berbeda, sehingga dapat memperluas pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa di berbagai daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Hubungan antara *prinsipal* (masyarakat) dan *agen* (pemerintah desa) dalam pengelolaan sumber daya publik dijelaskan oleh teori keagenan, yang disampaikan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Pada konteks pengelolaan dana desa, pemerintah desa berfungsi selaku *agen* yang harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan penggunaan uang yang diterapkan, sementara masyarakat mempunyai peranan selaku pihak yang memberikan wewenang maupun keyakinan terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran yang benar. Untuk mengurangi konflik kepentingan dan menghentikan anomali dalam pengelolaan dana publik, teori ini menekankan pentingnya prosedur pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi. Kemungkinan terjadinya moral hazard di pihak pengelola dapat diminimalkan dengan akuntabilitas dan transparansi yang efektif, sehingga mengoptimalkan kinerja pengelolaan dana desa. Maka, Teori keagenan menyediakan kerangka teoritis yang signifikan untuk menguraikan bagaimana keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi bisa berdampak positif dan berkelanjutan terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

Hubungan antara *prinsipal* (pemberi wewenang) dan *agen* (pelaksana wewenang) dijelaskan oleh teori keagenan, menurut Godfrey et al. (2010) dan Scott (2011). *agen* bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya *prinsipal* guna mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pemerintahan desa, masyarakat bertindak selaku kepala yang memberi mandat terhadap pemerintah desa selaku *agen* dalam pengelolaan dana desa demi kesejahteraan bersama. Hubungan ini

bersifat kontraktual dan dapat menimbulkan konflik jika terjadi perbedaan kepentingan, terutama terkait penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa. Sejalan dengan pendapat Supriyono (2018) dan Dewi & Ekadjaja (2020), teori keagenan menekankan bahwa konflik muncul dikarenakan terdapat asimetri informasi, yakni ketika *agen* mempunyai informasi lebih banyak dari pada *prinsipal*. Pada pengelolaan dana desa, kepala desa umumnya lebih memahami kondisi keuangan, pelaksanaan program, dan pelaporan anggaran dibandingkan masyarakat. Ketimpangan ini dapat menimbulkan penyimpangan atau menurunkan kepercayaan publik jika tidak diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi. Dikarenakan, teori keagenan menjadi landasan utama untuk menjelaskan bagaimana penerapan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) dapat mengurangi konflik kepentingan pada pemerintah desa serta masyarakat.

Dalam Perspektif teori keagenan, asumsi dasar teori ini memberikan dasar untuk memahami dampak akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat pada kinerja mengelola anggaran desa. Akuntabilitas berperan sebagai mekanisme kontrol agar agen dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kepada prinsipal secara terbuka dan jujur (Saifi, 2019). Transparansi membantu mengurangi kesenjangan informasi dan peningkatan keyakinan masyarakat pada pemerintah desa, sedangkan Partisipasi masyarakat menjadi bentuk peninjauan sosial yang mendorong agen bekerja sesuai dengan mandat publik. Ketiga variabel ini berfungsi sebagai alat pengendalian dalam hubungan keagenan, dan apabila diimplementasi secara konsisten, bisa mendukung kinerja mengelola anggaran desa.

2.1.2 Akuntabilitas

Lembaga Administrasi Negara Indonesia dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2000) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk memberikan laporan atau penjelasan tentang kinerja dan tindakan pemimpin organisasi kepada orang yang memiliki hak atau wewenang untuk menuntut akuntabilitas. Akuntabilitas juga merupakan aspek utama dalam

setiap pekerjaan, dalam arti bahwa semua yang berhubungan dengan publik harus menjalankan kewajiban akuntabilitas. Ini juga berfungsi sebagai alat untuk menilai efektivitas, efisiensi, keandalan, dan kemampuan untuk diprediksi. Mardiasmo (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah tanggung jawab pemegang amanah (*agen*) untuk penyampaian laporan, mengungkapkan, serta menjelaskan seluruh kegiatan yang menjadi kewajiban terhadap pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang mempunyai hak serta kewenangan dalam menuntut kewajibannya (Nuraeni & Kusuma, 2021).

Berlandaskan uraian tersebut tentang akuntabilitas, bisa diperoleh kesimpulan jika akuntabilitas yaitu tanggung jawab pemegang amanah, yaitu pemerintah, terhadap pemberi amanah, yaitu masyarakat, mengenai pelaksanaan kebijakan dan semua hasil kerja yang telah dilakukan pemerintah selaras pada aturan yang berlaku di suatu daerah tertentu.

2.1.3 Transparansi

Transparansi merupakan aspek dalam pemerintahan yang mengharuskan pemerintah membuka akses informasi kepada masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengawasi, memahami, dan menilai setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteks keuangan desa, transparansi merujuk pada penyediaan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan penggunaan dana dan laporan keuangan desa. Penyampaian informasi tersebut kepada publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa maupun pemerintah secara umum. Menurut Rahmanurrasjid (2008), jaminan informasi diwujudkan melalui laporan kinerja pemerintah yang disampaikan secara rutin kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam mewujudkan transparansi, pemerintah perlu menerapkan sistem pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai pihak utama dalam pelayanan publik. Dengan demikian, masyarakat sebagai pihak yang dilayani memiliki hak untuk mengetahui laporan dan pertanggungjawaban pemerintah (Rosyan et al., 2021).

Berdasarkan hasil penelitian dari Mardiasmo (2021) menunjukkan bahwa transparansi adalah upaya pemerintah untuk memberi informasi tentang

mengelola sumber daya publik terhadap yang memerlukannya, yaitu masyarakat. Selain itu, menurut Ultafiah (2017), transparansi adalah sebuah konsep yang memastikan setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk menerima informasi tentang administrasi pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan, pembuatannya, pelaksanaannya, dan hasilnya. Kemudian Hasil penelitian Temalagi et al. (2023) menunjukkan jika transparansi berdampak positif serta relevan dalam mengendalikan anggaran desa dalam perwujudan *good governance*. Penelitian berikut menegaskan jika keterbukaan informasi mengenai keuangan desa, mulai pada tahapan merencanakan, melaksanakan, sampai pertanggungjawaban, menjadi faktor penting untuk penciptakan tata kelola yang baik serta akuntabel. Kepercayaan publik meningkat dan pengawasan sosial yang efisien terhadap penggunaan keuangan desa didorong ketika pemerintah desa memberikan informasi yang jelas, jujur, dan tersedia secara bebas kepada masyarakat. Selain itu, Muksin et al. (2023) menyatakan bahwa implementasi transparansi dalam pengelolaan dana desa bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada masyarakat karena masyarakat memiliki hak untuk memahami secara komprehensif tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pendapat ini konsisten dengan temuan penelitian Dewi & Priyo (2019), yang menyoroti pentingnya keterbukaan dalam membangun kepercayaan publik dan akuntabilitas dalam tata kelola dana desa.

2.1.4 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dalam pembangunan desa adalah sebuah proses yang melibatkan banyak aspek, dengan penekanan pada keterlibatan aktif dari anggota masyarakat di samping usaha pemerintah. Pendekatan yang bersifat kolaboratif ini, yang disebut sebagai tata kelola partisipatif, memastikan bahwa kebutuhan dan perhatian masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya menghasilkan tata kelola yang lebih baik dan responsif. Keterlibatan masyarakat sangat krusial, karena memungkinkan individu untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka dan

merancang strategi untuk mengatasinya, yang juga membangun rasa kepemilikan serta kesejahteraan. Selain itu, keterlibatan masyarakat berkontribusi pada pembentukan kepercayaan dan kerja sama antara masyarakat dan pihak luar, yang meningkatkan keseluruhan proses pembangunan. Kepemimpinan yang bersifat kolaboratif berperan penting dalam konteks ini, karena mendorong partisipasi yang adil dan sukarela di antara berbagai organisasi, yang pada akhirnya berujung pada hasil pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, hubungan antara partisipasi masyarakat dan inisiatif pemerintah sangat krusial untuk keberhasilan pembangunan desa, menekankan tanggung jawab bersama dalam memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di pedesaan.

Menurut studi yang dilaksanakan oleh Ultafiah (2017), dijelaskan jika kontribusi berarti kontribusi serta keterkaitan warga untuk mengelola anggaran Desa, yang dimulai dengan terlibat dalam perencanaan, pengawasan, serta penilaian untuk memperoleh temuan yang selaras pada tujuan yang telah ditentukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada lima elemen dalam partisipasi, yaitu berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan, tanpa adanya paksaan dan menyadari perannya, menunjukkan sikap proaktif, memberikan kontribusi baik secara fisik maupun non-fisik, serta menyepakati hal-hal yang diperlukan (Solekhan, 2014). Sementara itu, indikator partisipasi masyarakat itu sendiri meliputi keterlibatan setiap warga dalam perencanaan serta penerapan pengelolaan Dana Desa, partisipasi setiap warga pada pengawasan mengelola Dana Desa, serta keikutsertaan semua warga dalam menerima manfaat dari kegiatan pengembangan dan penguatan masyarakat yang didanai melalui Dana Desa (Ardiyanti, 2019).

Partisipasi untuk mengelola anggaran desa sangatlah krusial karena bisa dalam peningkatan efektivitas mengelola tersebut. Oleh karena itu, jika ada hal yang menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan untuk mengelola Dana Desa, masyarakat bisa memberi saran agar mengelola Dana Desa dapat berjalan dengan baik. Selain itu, Saragih (2011) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah elemen penting dalam upaya perbaikan infrastruktur dan

lingkungan. Hal ini memastikan bahwa proyek dan rencana komunitas mendapatkan perhatian yang sesuai, yang pada gilirannya memperkuat hubungan di tingkat lokal serta membangun modal sosial. Sasaran utama pada semua ini yaitu membentuk hubungan yang baik serta bermakna pada masyarakat dengan pemerintah. Peran masyarakat dalam inisiatif kemitraan antara komunitas dan pemerintah merupakan tambahan baru yang relatif signifikan (McCabe et al., 2005).

2.1.5 Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Kinerja pengelolaan dana desa yaitu cerminan dari kemampuan pemerintah desa untuk pengelolaan sumber daya keuangan dengan efektif, efisien, transparan serta akuntabel guna mewujudkan tujuan pembangunan desa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahmudi (2019), kinerja sektor publik dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil yang diukur berdasarkan efektivitas serta efisiensi dalam implementasi program serta tanggung jawab dalam penggunaan sumber daya publik. Pada konteks pemerintahan desa, kinerja mengelola anggaran desa menekankan bagaimana aparat desa mampu merencanakan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan anggaran selaras pada aturan yang ada, terutama Permendagri No. 20 Tahun 2018 terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada studi yang dilakukan oleh Halim (2020), ditemukan bahwa pengelolaan dana desa dianggap berhasil apabila proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melibatkan masyarakat, pelaporan dilakukan secara transparan, dan hasil dari kegiatan tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan gagasan nilai untuk uang yang menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, serta pencapaian untuk mengelola sumber daya publik. Kinerja mengelola anggaran desa diukur tidak hanya berdasarkan hasil fisik seperti pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh Rahayu & Handayani (2019), efektivitas mengelola anggaran desa diberikan pengaruh oleh faktor-faktor yaitu akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat. Selain itu Rahayu & Handayani (2019) menemukan jika akuntabilitas serta transparansi berdampak positif yang relevan pada kinerja mengelola anggaran desa di Kabupaten Sleman. Desa yang memiliki sistem pelaporan dan keterbukaan publik yang baik cenderung memperlihatkan kinerja yang lebih maksimal. Hasil yang sama dikemukakan oleh Supriadin & Wardan (2024), yang menegaskan bahwa keterkaitan masyarakat untuk merencanakan serta peninjauan pemanfaatan dana desa berkontribusi pada peningkatan efektivitas program pembangunan desa. Selanjutnya Mulyana (2020) juga mengidentifikasi bahwa di Jawa Barat, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran desa berpengaruh secara langsung terhadap pandangan terhadap kinerja pemerintah desa. Desa yang menggunakan dana dengan efisien biasanya memiliki hasil program yang lebih baik dan masyarakat merasa lebih puas. Di sisi lain, Sari et al. (2022) juga menyatakan bahwa penerapan dana desa yang mengutamakan transparansi dan mengikuti aturan berdampak positif terhadap kinerja keuangan serta pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dari berbagai temuan studi tersebut diperoleh kesimpulan jika kinerja mengelola anggaran desa yaitu temuan pada interaksi banyak faktor tata kelola yang baik, meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, serta kepatuhan terhadap regulasi. Semakin baik penerapan prinsip-prinsip tersebut, sehingga semakin tinggi pula mutu mengendalikan anggaran desa untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Maka, pengukuran kinerja mengelola anggaran desa perlu memperhatikan aspek proses (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan) dan hasil (manfaat program bagi masyarakat) secara komprehensif agar dapat menjadi dasar evaluasi yang objektif dan berkelanjutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil studi sebelumnya mengenai penelitian tentang dampak akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi memang bervariasi, dengan berbagai jenis studi

yang dilaksanakan baik di sektor pemerintahan ataupun di perusahaan. Berikut ini adalah penelitian- penelitian yang sudah dilaksanakan oleh para penulis sebelumnya dengan berbagai subjek serta lokasi penelitian yang berbeda-beda sebagaimana akan penulis teliti.

Berikut adalah beberapa studi terdahulu yang mengkaji tentang dampak akuntabilitas, transparansi, serta kontribusi pada kinerja mengelola anggaran desa:

Tabel 2.2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian
Nurul Aida Natasya, Desmiyawati & Lila Anggraini (2022)	Analisis Penerapan Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar	Temuan studi menyatakan jika mengelola anggaran desa berjalan baik, pada akuntabilitas sesuai regulasi, transparansi melalui publikasi informasi, dan kontribusi masyarakat yang cukup tinggi terhadap penerapan hingga peninjauan. Namun, terdapat hambatan berupa keterlambatan pencairan dana yang memengaruhi pelaksanaan program.
Muhammad Arifin & Hamzah (2020)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Barebo Kabupaten Bone	Temuan studi menyampaikan jika keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan keterbukaan secara signifikan dan positif memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan lebih baik ketika akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan partisipasi

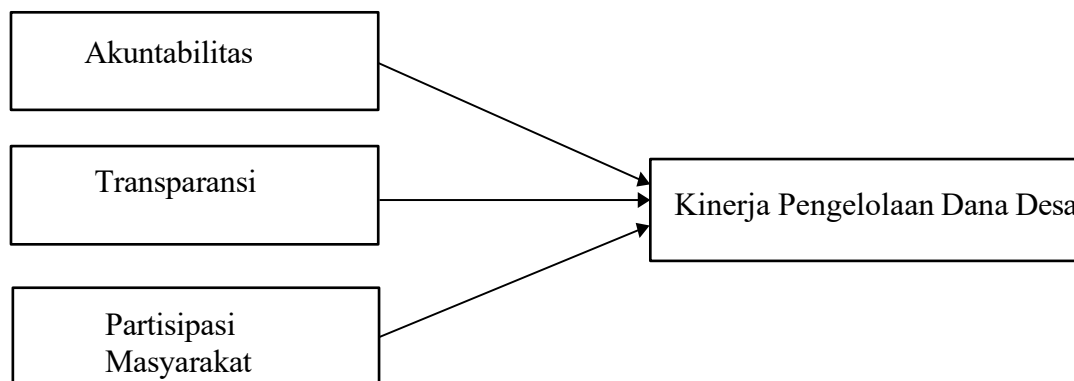
Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian
		masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan diimplementasikan.
Dyah Evita Dewi & Hari Adi Priyo (2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana	Tujuan yang dinyatakan dalam pelaksanaan akuntabilitas di Desa Candirejo, seperti pembangunan jalan dan pemberdayaan masyarakat, telah tercapai secara efektif. Selain pemasaran dalam bentuk spanduk atau pengumuman selama pertemuan tentang data keuangan dana desa, laporan rutin tentang pengelolaan dana desa juga dapat diakses.
M. Faizin Ardiansyah & Umaimah (2023)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa terhadap Kinerja Pemerintah	Temuan studi ini memperlihatkan jika akuntabilitas serta transparansi berdampak positif serta relevan pada kinerja pemerintah desa, di mana peningkatan keduanya mendorong kinerja aparatur desa menjadi lebih baik.
Suciana, R. (2021)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansidan Partisipasi terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sinjai	Temuan studi ini memperlihatkan jika keterlibatan publik, akuntabilitas, dan keterbukaan semuanya secara positif dan signifikan memengaruhi kinerja pengelolaan dana desa. Akuntabilitas dan keterbukaan memainkan peran utama, dan keterlibatan publik membantu meningkatkan standar administrasi dana desa.

Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian
Maria Nerviana Jawa, Konstantinus Pati Sanga & Emilianus Eo K. Goo (2024)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Dobo Nuapu'u Kecamatan Mego.	Temuan studi menunjukkan jika secara parsial akuntabilitas tidak berdampak relevan pada pengelolaan alokasi anggaran desa, sementara transparansi berpengaruh signifikan. Namun, akuntabilitas dan transparansi yang dipadukan memiliki dampak besar pada bagaimana dana desa dialokasikan, yang memvalidasi ketersediaan informasi dalam meningkatkan standar administrasi dana desa.
Putri Tika (2023)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa- desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak)	Temuan penelitian menyampaikan jika keterlibatan, tanggung jawab, dan keterbukaan secara signifikan dan positif memengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa. Penerapan konsep akuntabilitas, transparansi informasi, dan keterlibatan aktif masyarakat sangat penting untuk meningkatkan standar administrasi dana desa di Kabupaten Mempura, sebagaimana dibuktikan oleh dampak signifikan simultan dari ketiga variabel tersebut..

Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian
Yuni Puspita Sari (2025)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa melalui Partisipasi Masyarakat dengan Relevansi Nilai Syariah di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang	Temuan studi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa dan keterlibatan masyarakat dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh akuntabilitas dan keterbukaan. Selain itu, keterlibatan masyarakat memiliki dampak besar dan berfungsi sebagai mediator untuk peningkatan kinerja. Temuan berikut menyampaikan pentingnya akuntabilitas, transparansi, serta kontribusi yang sejalan dengan nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berlandaskan analisis teori yang terdapat pada tinjauan pustaka di atas, dalam pemahaman ikatan pada variabel-variabel terhadap studi berikut, dapat digambarkan melalui kerangka pemikiran dengan pola sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pernyataan pendahuluan yang menghubungkan dua variabel atau lebih untuk menjawab permasalahan yang diberikan dalam suatu studi yang sudah dilaksanakan serta berkaitan dengan studi dalam pokok yang dibahas pada penelitian ini, maka hipotesis yang terdapat pada studi berikut yakni:

2.4.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Teori Keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), yang menggambarkan interaksi antara *prinsipal* (masyarakat) dan *agen* (pemerintahan desa) dalam proses pengelolaan sumber daya publik, merupakan dasar dari penelitian ini. Dalam hal pengelolaan dana desa, pemerintah desa berfungsi sebagai agen yang harus bertanggung jawab atas semua kebijakan dan penggunaan dana, sementara masyarakat bertindak sebagai pihak yang memberikan mandat atau kepercayaan kepada pejabat desa untuk mengelola dana tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Teori Keagenan, yang menyangkut interaksi pada pemerintah desa selaku *agen* serta masyarakat selaku *prinsipal*, berlandaskan pada kontrak sosial di mana *agen* dipercayakan dalam pengelolaan sumber daya publik untuk keperluan masyarakat. Pada hal pengelolaan dana desa, teori ini menyoroti peran akuntabilitas sebagai perangkat untuk menjamin bahwa *agen* bertindak sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh *prinsipal*. Pemerintah desa mempunyai kewajiban moral serta administratif dalam memberikan laporan secara transparan dan jujur mengenai semua aktivitas mengelola anggaran desa, pada tahapan merencanakan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dengan adanya akuntabilitas yang baik, ketidaksetaraan informasi antara *agen* dan *prinsipal* dapat diminimalkan, sehingga peningkatan keyakinan masyarakat serta mengurangi kemungkinan menyalahgunakan wewenang.

Secara Konseptual ketika aparat desa memiliki tingkat kesadaran akan akuntabilitas yang tinggi melalui laporan yang jelas, audit yang terbuka, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan setiap keputusan terkait mengelola anggaran desa akan menjadi lebih terarah, efektif, serta selaras pada kebutuhan publik. Pandangan berikut sejalan dengan pendapat Alqodri (2015) menyebutkan Akuntabilitas berdampak dengan positif serta relevan pada mengelola keuangan daerah (studi terhadap pemerintah Kota Dumai). Hasil serupa dikemukakan oleh Edri et al. (2022) yang menjelaskan jika akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa berkontribusi positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Suryani (2022) menegaskan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dalam setiap tahap perencanaan dan pelaporan program desa berdampak positif terhadap efektivitas program dan kepercayaan masyarakat, sementara itu Babulu (2020) mengindikasikan bahwa akuntabilitas yang tinggi mampu mengatasi adanya penyimpangan serta peningkatan efisiensi dalam pemakaian anggaran desa. Berdasarkan pengertian diatas maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H1: Akuntabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa.

2.4.2 Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Teori Keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), yang menggambarkan interaksi antara *prinsipal* (masyarakat) dan *agen* (pemerintahan desa) dalam proses pengelolaan sumber daya publik, merupakan dasar dari penelitian ini. Dalam hal pengelolaan dana desa, pemerintah desa berfungsi sebagai agen yang harus bertanggung jawab atas semua kebijakan dan penggunaan dana, sementara masyarakat bertindak sebagai pihak yang memberikan mandat atau kepercayaan kepada pejabat desa untuk mengelola dana tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Transparansi yaitu memberikan informasi kepada publik secara terbuka dan memastikan bahwa mereka memperolehnya dengan cepat ketika dibutuhkan. Keterbukaan ini menjamin bahwa pihak berwenang dapat mengawasi dan mengelola dana lokal dengan tepat. Hal ini menjamin penggunaan keuangan desa yang efisien, yang dimaksudkan untuk memperkuat masyarakat (Ardiyanti, 2019).

Teori Keagenan menjelaskan ikatan pada pemerintah desa selaku *agen* serta masyarakat selaku *prinsipal*, dengan berfokuskan dalam pengelolaan dana desa yang memerlukan transparansi di setiap tahap. Teori ini mengemukakan bahwa *agen* sering mempunyai akses lebih besar pada informasi daripada *prinsipal*, yang dikenal sebagai asimetri informasi. Tanpa adanya keterbukaan, *agen* memiliki kemungkinan untuk menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, transparansi sangat penting sebagai alat kontrol dalam pengurangan permasalahan keagenan pada pemerintah desa serta masyarakat. Dengan mengumumkan secara terbuka informasi mengenai alokasi, realisasi, dan pertanggungjawaban dana desa, pemerintah desa memungkinkan masyarakat dan pengawas untuk mengawasi keputusan dan aktivitas yang dilakukan. Melalui keterbukaan ini, kesenjangan informasi dapat diminimalkan, kepercayaan masyarakat dapat meningkat, dan pengelolaan dana desa pun cenderung mengalami perbaikan.

Menurut studi Putri Tika (2023), transparansi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Karena keterbukaan ini, dana desa yang diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dapat dikendalikan dan diawasi dengan baik oleh pihak yang berwenang (Ardiyanti, 2019). Selanjutnya Hasil Penelitian oleh Lihawa et al. (2025) menjelaskan bahwa peningkatan transparansi dalam penyusunan dan pelaporan keuangan desa mampu memperkuat kepercayaan publik serta mendorong efektivitas kinerja pengelolaan dana desa. Sejalan dengan itu, Suciana et al. (2025) menemukan bahwa transparansi yang diterapkan melalui keterbukaan informasi anggaran berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya, Asrul (2024) juga mengemukakan bahwa tingkat transparansi yang tinggi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan desa secara langsung meningkatkan akurasi penggunaan dana serta memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan desa. Sementara itu hasil serupa ditemukan oleh Ismail (2023) yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi mengenai anggaran desa dan hasil realisasinya berperan penting dalam peningkatan efisiensi kinerja mengelola anggaran desa. Namun, studi oleh Murapi & Astarini (2025) turut menegaskan bahwa transparansi mempunyai hubungan positif serta relevan dengan peningkatan kinerja mengelola anggaran desa, karena masyarakat dapat ikut mengawasi dan menyakinkan pemakaian anggaran selaras tujuan pembangunan. Berlandaskan banyak temuan studi tersebut, bisa diperoleh kesimpulan jika transparansi yaitu aspek fundamental yang berkontribusi secara nyata pada peningkatan kinerja mengelola anggaran desa. Berdasarkan argumen serta temuan riset terdahulu sehingga hipotesis kedua adalah:

H2: Transparansi Berpengaruh Positif Terhadap kinerja Pengelolaan Dana Desa.

2.4.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Teori Keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), yang menggambarkan interaksi antara *prinsipal* (masyarakat) dan *agen* (pemerintahan desa) dalam proses pengelolaan sumber daya publik, merupakan dasar dari penelitian ini. Dalam hal pengelolaan dana desa, pemerintah desa berfungsi sebagai agen yang harus bertanggung jawab atas semua kebijakan dan penggunaan dana, sementara masyarakat bertindak sebagai pihak yang memberikan mandat atau kepercayaan kepada pejabat desa untuk mengelola dana tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Teori Keagenan menguraikan ikatan pada pemerintah desa selaku *agen* serta masyarakat selaku *prinsipal* yang memerlukan keseimbangan peran pada tahapan penentuan keputusan serta mengelola dana publik. Pada hal ini, keterlibatan masyarakat berperan penting selaku alat untuk mengurangi Kesenjangan informasi antara kedua belah pihak. Masyarakat sebagai *prinsipal* berhak untuk mendapatkan informasi, melakukan pengawasan, serta memberikan masukan di setiap tahapan mengelola anggaran desa dimulai pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai penilaian. Dalam adanya keterlibatan aktif dari masyarakat, kemungkinan *agen* (pemerintah desa) untuk bertindak melenceng dari kepentingan umum bisa diminimalkan. Oleh karena itu, partisipasi dapat berguna selaku mekanisme pengendalian yang bisa dalam pengurangan permasalahan keagenan, dan peningkatan akuntabilitas serta efektivitas penggunaan anggaran desa.

Temuan studi sebelumnya memperlihatkan jika keterlibatan masyarakat memiliki peran penting untuk meningkatkan kinerja mengelola anggaran desa. Penelitian oleh Putri (2023) dan Ultafiah (2017) menunjukkan bahwa partisipasi langsung masyarakat bisa mendukung fungsi peninjauan serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih transparan. Selain itu, Ishardiyanti et al. (2025) dan Sari (2025) menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat berkontribusi untuk peningkatan transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Temuan lain dari Prasasti & Ma'ruf (2025) juga menunjukkan bahwa

sinergi antara aparat desa dan masyarakat menjadi aspek penting untuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan publik. Dalam perspektif teori keagenan, partisipasi masyarakat berperan dalam pengurangan asimetri informasi pada agen serta prinsipal melalui mekanisme pengawasan sosial. Oleh karena itu, bertambah tinggi tingkat kontribusi masyarakat, sehingga bertambah baik pula kinerja mengelola anggaran desa. Maka hipotesis ketiga pada studi berikut yaitu:

H3: Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Positif Terhadap kinerja Pengelolaan Dana Desa

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metodologi asosiatif-kausal. Pendekatan kuantitatif dipilih dikarenakan memungkinkan peneliti untuk menggunakan analisis statistik guna menilai hubungan antar variabel secara objektif. Sugiyono (2021) menyatakan bahwa metode kuantitatif berlandaskan positivisme, menggunakan populasi atau sampel tertentu, memanfaatkan alat penelitian, dan menghasilkan temuan melalui analisis statistik. Dampak variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa dievaluasi menggunakan metode asosiatif-kausal.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Sugiyono (2021) mendefinisikan populasi sebagai kawasan generalisasi yang tersusun atas objek maupun subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dalam mempelajari serta mengambil kesimpulan. Populasi pada studi ini yaitu semua desa di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat yang menerima dan melaksanakan anggaran desa. Seluruh desa tersebut berkewajiban menjalankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sesuai Permendesa PDPTT Nomor 13 Tahun 2020.

3.2.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sugiyono (2021) mendefinisikan pengambilan sampel jenuh sebagai strategi pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi diambil sampelnya. Pengambilan sampel bertujuan adalah teknik yang digunakan untuk memilih subset populasi untuk penelitian. Sampel adalah subset dari kuantitas dan ciri-ciri yang ada dalam populasi, menurut Sugiyono (2021). Pengambilan sampel bertujuan, yaitu pemilihan sampel berlandaskan kriteria spesifik yang disesuaikan pada tujuan penelitian, digunakan dalam proses pengambilan sampel. Metode ini digunakan karena tidak setiap penduduk desa memiliki kemampuan dan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dan statistik keuangan. Dengan demikian, kepala desa, sekretaris desa, serta tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan tersebut menjadi sampel penelitian.

Kriteria sampel:

1. Kepala Desa yang masih Aktif menjabat.
2. Sekretaris Desa yang masih aktif menjabat.
3. Tokoh masyarakat yang terkait aktif pada aktivitas dan keorganisasian masyarakat.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipakai pada studi berikut yakni data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan langsung oleh penulis pada sumber pertama dengan tahapan mengumpulkan data di lapangan. Pada studi ini, data utama digabungkan dengan membagikan kuesioner terhadap pihak-pihak yang terkait pada merencanakan, mengelola, serta akuntabilitas desa di Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. pemakaian data primer mempunyai tujuan dalam mendapatkan relevan serta selaras pada kondisi aktual yang terjadi di lapangan. Maka, data yang terkumpulkan diharapkan mampu menjelaskan dengan akurat keadaan variabel yang diteliti (Sugiyono, 2021).

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Kuesioner

Kuesioner yaitu instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan yang disusun untuk memperoleh informasi terkait permasalahan atau objek yang diteliti. Kuesioner umumnya dirancang secara sistematis dengan dengan skala Likert guna menentukan perilaku, persepsi, serta pendapat responden terhadap variabel penelitian. Instrumen ini dipakai selaku alat pengumpulan data dalam cara membagikan pertanyaan terhadap responden untuk diisi sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Penggunaan kuesioner memungkinkan peneliti memperoleh data yang terstruktur dan mudah dianalisis secara kuantitatif. Dengan demikian, kuesioner menjadi salah satu metode yang efektif dalam pengumpulan data penelitian sosial (Sugiyono, 2021).

Melalui kuesioner, peneliti dapat mengetahui kecenderungan dampak positif maupun negatif dari variabel yang diteliti dengan menggunakan skala Likert (Sugiyono, 2021). Selain itu, kuesioner juga digunakan untuk menggali pendapat serta pandangan individu maupun kelompok. Pada studi ini, kuesioner disebarkan kepada 40 responden dan memuat pertanyaan yang berhubungan pada akuntabilitas, transparansi, kontribusi serta kinerja mengelola anggaran desa. Instrumen tersebut digunakan untuk menganalisis dampak dari variabel-variabel yang diteliti.

3.4.2 Penentuan Skor

Penentuan skor pada penelitian dengan skala Likert merupakan proses pemberian nilai terhadap setiap jawaban responden berdasarkan tingkat persetujuan maupun persepsi pada pernyataan yang disampaikan dalam kuesioner. Skala Likert dipakai dalam menentukan perilaku, pendapat, serta pandangan seseorang dengan cara memberikan bobot tertentu pada setiap pilihan jawaban yang telah disusun secara sistematis. Oleh karena itu, setiap alternatif jawaban harus ditetapkan skor yang jelas agar dapat diolah dan dianalisis secara kuantitatif. Pemberian skor ini mempunyai tujuan guna membantu penulis dalam

menginterpretasikan data yang diperoleh dari responden. Dengan demikian, penggunaan skala Likert memungkinkan data kualitatif diubah menjadi data kuantitatif yang bisa dikaji dengan statistik (Sugiyono, 2021).

Tabel 3.4.1 Skor Skala Likert

Skala	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Tidak Setuju	3
Sangat Tidak Setuju	2
Netral	1

a. Nilai Ideal (Kriteria)

Nilai ideal merupakan nilai yang dipakai sebagai dasar dalam perhitungan skor untuk mengukur hasil penilaian serta menentukan batas nilai tertinggi dan terendah dari seluruh jawaban responden. Penentuan nilai ideal dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai rentang skor yang mungkin diperoleh pada setiap item pernyataan dalam kuesioner. Dalam penelitian kuantitatif, nilai ideal umumnya dihitung berdasarkan jumlah item pernyataan, jumlah responden, dan bobot skala yang digunakan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam menginterpretasikan hasil penelitian (Riduwan, 2020; Sugiyono, 2021). Untuk mengukur nilai ideal pada seluruh item, dapat digunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Skor Kriterion} = \text{Skor tertinggi} \times \text{Jumlah Responden}$$

b. Rating Skala

Skala penilaian dipakai dalam memahami temuan pengolahan data kuesioner secara umum serta menyeluruh yang didapatkan pada instrumen penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, penggunaan skala penilaian seperti skala Likert dipakai dalam menentukan sikap, persepsi, dan asumsi responden pada suatu objek observasi, sehingga data yang didapatkan bisa dikaji dengan kuantitatif serta dianalisis lebih lanjut (Ghozali, 2018; Sugiyono, 2021). Dengan demikian, hasil

pengukuran dari kuesioner bisa menjelaskan yang lebih sistematis terkait variabel yang dikaji. Pada kriteria yaitu :

Tabel 3.4.2 Rating Skala

Nilai	Skala
81 – 100	Sangat Setuju
61 – 80	Setuju
41 – 60	Tidak Setuju
21 – 40	Sangat Tidak Setuju
0 – 20	Netral

c. Presentase Persejutan

Dalam rangka mengolah dan menyajikan data hasil kuesioner secara sistematis, diperlukan suatu teknik analisis yang mampu menggambarkan distribusi jawaban responden terhadap setiap indikator penelitian. Untuk memahami persentase jawaban seluruh responden, digunakan rumus persentase untuk mengetahui tingkat capaian dari setiap indikator yang diukur. Perhitungan persentase ini bertujuan dalam pemberian penjelasan terkait proporsi jawaban responden pada suatu variabel penelitian. Terdapat rumus yang dipakai yaitu dibawah ini (Riduwan, 2020; Sugiyono, 2019):

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Presentase

f : Frekuensi dari setiap jawaban

n : Nilai jumlah ideal

100 : Bilangan tetap

3.5 Operasional Variabel

Dalam studi berikut terdapat empat variabel, yaitu akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat sebagai variabel independen (X), serta kinerja pengelolaan dana desa selaku variabel dependen (Y). Masing-masing variabel diukur melalui indikator-indikator yang disusun dalam bentuk pernyataan kuesioner. Data yang didapatkan selanjutnya dikaji dengan rumus persentase capaian guna memahami tingkat pencapaian setiap variabel. Hasil persentase tersebut selanjutnya dikonversikan ke dalam skala Likert 1–5 agar memudahkan dalam proses interpretasi. Penggunaan skala Likert dalam penelitian kuantitatif dimaksudkan untuk mengukur sikap, persepsi, dan pendapat responden secara terstruktur, sehingga data yang bersifat kualitatif dapat diubah menjadi data kuantitatif yang bisa dikaji dengan statistik (Sugiyono, 2019). Variabel penelitian beserta pengukurannya dijelaskan lebih lanjut pada penjabaran berikut.

Tabel 3.5.1 Devinisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Kinerja pengelolaan dana desa	Pengelolaan APBDes yaitu tahapan merencanakan serta pemakaian anggaran desa yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan prioritas pembangunan secara efektif (Nurlukman & Said, 2019)	1. Kejelasan sumber dana 2. Kesesuaian penggunaan dana 3. Kinerja tim pengelola	
2	Akuntabilitas	Akuntabilitas yaitu kewajiban dalam mengkomunikasikan kewajiban atau untuk menanggapi dan memberikan penjelasan	1. Penggunaan laporan APBdes 2. Pelaporan pelaksanaan APBdes secara cepat dan tepat	

		atas kinerja dan tindakan individu, badan hukum, atau pemimpin organisasi kepada orang yang memiliki hak atau wewenang untuk mencari informasi atau kewajiban.``r (Bastian, 2010).	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan APBdes 4. Pelaksanaan pertanggungjawaban APBdes
3	Transparansi	Gagasan transparansi memastikan bahwa setiap orang berhak mengakses informasi tentang bagaimana pemerintahan dijalankan (Sujarweni, 2015).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumuman APBdes 2. Sosialisasi program peningkatan kesejahteraan masyarakat kepada rakyat. 3. Pengumuman dilakukan secara tepat waktu. 4. Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait proses .pembuatan kebijakan desa
4	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan warga melalui terciptanya komitmen nilai dalam masyarakat agar termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa (Suryantari et al., 2025).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi publik 2. Media massa 3. Keterlibatan masyarakat terhadap musyawarah pembangunan desa.

3.6 Teknik Analisis Data

Perangkat lunak SPSS versi 22 digunakan dalam metode analisis data kuantitatif pada penelitian ini. Tujuan penelitian ini yaitu guna mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen (Y = Kinerja Pengelolaan Dana Desa) terhadap variabel independen (X_1 = Akuntabilitas, X_2 = Transparansi, dan X_3 = Partisipasi Masyarakat). Informasi yang dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi kemudian diubah menjadi data numerik dan diuji dengan statistik menggunakan langkah-langkah berikut:

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Sebelum melakukan pengujian tambahan, analisis statistik deskriptif dilakukan dalam memberikan gambaran umum tentang fitur-fitur data penelitian. Nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum, dan deviasi standar dari setiap variabel yang diteliti dapat ditentukan oleh peneliti menggunakan metodologi ini. Sugiyono (2021) menyebutkan jika statistik deskriptif dipakai dalam menjelaskan atau mengilustrasikan data dalam keadaan saat ini tanpa mencoba membuat generalisasi yang luas. Dengan demikian, kajian ini menjadi tahap awal yang penting untuk memahami kondisi empiris data penelitian, yang diukur menggunakan perangkat lunak statistik seperti *SPSS* melalui tabel *Descriptive Statistics* yang menampilkan ukuran-ukuran pemusatan dan penyebaran data.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Ghozali (2018) mendefinisikan keterandalan sebagai tingkat di mana instrumen survei atau kuesioner dapat secara konsisten menghasilkan temuan saat menilai suatu variabel atau konstruk. Ketika tanggapan responden terhadap kuesioner konsisten dan tidak berubah secara substansial ketika penilaian berulang dilakukan dalam keadaan yang sama, kuesioner tersebut dianggap dapat dipercaya. Tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk memastikan apakah setiap butir pertanyaan instrumen penelitian konsisten secara internal.

Pada studi berikut, pengujian reliabilitas dilakukan dalam teknik one shot maupun pengukuran satu kali, yakni pengumpulan data dilakukan sekali saja, kemudian dijelaskan tingkat konsistensi antar item pertanyaan melalui korelasi jawaban responden. Pengukuran reliabilitas dengan pengujian statistik *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel maupun konstruk diasumsikan reliabel jika mempunyai skor *Cronbach's Alpha* $> 0,60$.

3.6.3 Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengevaluasi seberapa baik instrumen kuesioner mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur, menurut Ghozali (2018). Jika pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dengan akurat memperlihatkan konsep atau variabel yang dituju untuk dinilai, maka kuesioner tersebut dianggap valid.

Korelasi Momen Produk digunakan untuk melakukan pengujian validitas dalam penelitian ini. Pengujian dilakukan dengan membandingkan skor setiap item pertanyaan dengan skor keseluruhan variabel. Apabila skor r yang dihitung positif dan lebih tinggi dari nilai r tabel, kuesioner tersebut dianggap asli (Ghozali, 2018).

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilaksanakan untuk meyakinkan jika model regresi linier yang dipakai terpenuhi persyaratan dasar analisis statistik, maka temuan pengujian menjadi valid dan reliabel. Uji ini meliputi beberapa tahapan, yakni pengujian normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi. Menurut Ghozali (2018), serangkaian pengujian asumsi klasik perlu dilaksanakan supaya model regresi tidak mengalami penyimpangan yang bisa memengaruhi ketepatan estimasi parameter. Alat ukur yang umum dipakai pada tahap ini yaitu berbagai uji dalam program SPSS, seperti *Kolmogorov-Smirnov Test* untuk normalitas, *Variance Inflation Factor (VIF)* untuk multikolinearitas, *Glejser Test* untuk heteroskedastisitas, serta *Durbin-Watson Test* untuk autokorelasi. Sebelum dilaksanakan kajian regresi linier berganda,

terlebih dahulu dilaksanakan pengujian asumsi klasik yang meliputi:

a. Uji Normalitas

Tujuan pada uji normalitas yaitu guna mengetahui apakah data residual dalam model regresi terdistribusi normal. Karena hal ini memengaruhi validitas uji t dan uji F, distribusi normal merupakan prasyarat penting untuk analisis regresi. Uji normalitas diperlukan dalam menyakinkan jika residual atau faktor pengganggu mempunyai distribusi normal, menurut Ghozali (2018). Grafik P-P Plot dan histogram residual menunjukkan hasil uji ini, yang dapat dilakukan dalam praktik dengan Uji Kolmogorov-Smirnov atau Uji Shapiro-Wilk. Apabila skor signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) lebih tinggi dari 0,05, data dianggap terdistribusi secara teratur.

b. Uji Multikolinearitas

Untuk memastikan apakah variabel independen dalam model regresi memiliki hubungan linier yang kuat, digunakan uji multikolinearitas. Temuan estimasi mungkin tidak stabil dan sulit dipahami ketika multikolinearitas tinggi. Multikolinearitas terjadi saat dua maupun lebih variabel penjelas dalam model regresi mempunyai hubungan linier yang sangat kuat, menurut Gujarati et al. (2012). Nilai Toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF) dari output SPSS digunakan untuk uji ini. Tidak terdapat multikolinearitas dalam model penelitian jika nilai toleransi lebih tinggi dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Untuk memastikan bahwa varians residual dalam model regresi konsisten di seluruh data, uji heteroskedastisitas digunakan. Temuan estimasi akan tidak efektif jika variansnya tidak sama. Uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan guna memastikan apakah ada perbedaan varians residual antar data dalam model regresi, menurut Ghozali (2018). Uji Glejser atau Uji Korelasi Peringkat Spearman menggunakan SPSS biasanya digunakan untuk uji ini. Dapat disimpulkan bahwa model tidak menunjukkan heteroskedastisitas jika nilai signifikansi temuan uji lebih tinggi dari 0,05.

3.6.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan yang mengkaitkan variabel-variabel pada studi ini ditemukan dengan regresi linier berganda, dan perangkat lunak SPSS 22 digunakan untuk menghitung nilai yang diharapkan atau diestimasi. Peneliti mempergunakan analisis regresi berganda, berlandaskan Sugiyono (2019), jika ingin memperkirakan bagaimana kondisi (naik dan turun) variabel dependen (kriteria), apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik atau diturunkan nilainya), dan jika terdapat minimal dua variabel independen. Tujuan penelitian ini yaitu guna mengetahui apakah adanya hubungan sebab-akibat antara variabel atau untuk menilai dampak akuntabilitas, transparansi, serta keterlibatan terhadap pengelolaan dana desa.

Berikut adalah persamaan regresi yang digunakan:

$$KPDD = \alpha + \beta_1 \text{ akuntabilitas} + \beta_2 \text{ transparansi} + \beta_3 \text{ partisipasi} + e$$

Keterangan:

KPDD = Kinerja Pengelolaan Dana Desa

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel X

e = error (residu)

3.6.6 Uji Hipotesis

Hipotesis yaitu pernyataan maupun asumsi sementara tentang suatu topik penelitian yang harus divalidasi secara empiris karena kebenarannya masih diragukan (Purwanto & Sulistyastuti, 2007). Uji hipotesis merupakan tahap lanjutan setelah analisis regresi dalam pengujian kebenaran asumsi atau pernyataan sementara yang sudah dirumuskan pada studi. Uji berikut bertujuan untuk mengetahui apakah variabel akuntabilitas, transparansi, serta kontribusi memiliki pengaruh yang relevan pada kinerja pengelolaan dana desa, baik dengan parsial maupun simultan.

Uji hipotesis dipakai dalam menilai kebenaran perkiraan atau pernyataan sementara yang dirumuskan pada studi. Ghazali (2018) menguraikan jika pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat seberapa jauh variabel independen mampu menguraikan macam-macam variabel dependen melalui serangkaian pengujian statistik seperti pengujian t, pengujian F, dan koefisien determinasi (R^2). Pada studi berikut, pengujian hipotesis dilaksanakan guna mengetahui dampak Akuntabilitas, Transparansi, serta kontribusi pada Kinerja Pengelolaan Dana Desa .

1. Uji t (Uji Pengaruh Parsial)

Pengujian Signifikan Regresi Parsial (Uji t) yaitu teknik statistik yang dipakai dalam kajian regresi guna mengevaluasi signifikansi kontribusi individu pada setiap variabel independen pada variabel dependen. Pengujian t ini membantu mengukur apakah koefisien regresi pada suatu variabel tertentu signifikan dengan statistik, dalam asumsi jika variabel-variabel lainnya tetap konstan (Purnomo et al., 2022). Tujuan utama uji t dalam uji ini adalah untuk menilai sejauh mana setiap variabel independen berpengaruh dengan relevan pada variabel dependen terhadap model regresi.

Uji t menjadi suatu metode dalam evaluasi signifikansi dampak variabel bebas dengan parsial atau individual pada variabel terikat menurut Purnomo et al. (2022). Menurut Gujarati et al. (2012), uji t dipakai

dalam mengukur seberapa besar dampak satu variabel independen dengan individual terhadap variabel dependen. Pengujian berikut menunjukkan apakah sebuah variabel bebas dengan signifikan menjelaskan perubahan variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan:

- Apabila $\text{Sig} < 0,05$, sehingga adanya pengaruh signifikan secara parsial.
- Apabila $\text{Sig} \geq 0,05$, sehingga tidak adanya pengaruh signifikan secara parsial.

2. Uji F (Uji Pengaruh Simultan)

Uji F yaitu teknik statistik yang dipakai dalam kajian regresi guna mengevaluasi keseluruhan signifikansi dari model regresi. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah model regresi dengan keseluruhan memberikan penjelasan yang relevan terhadap variabel dependen. Dalam makna lain, pengujian statistik P yang menjadi landasan memperlihatkan seberapa besar dampak satu variabel independen (DLK) kesimpulannya adalah pada variabel Dependen (EI), Menurut Hamid (2020) pengambilan:

1. Apabila skor F hitung 1 tabel maupun signifikansi < 0.05 sehingga artinya Variabel independen dengan bersama-sama berpengaruh pada variabel dependent.
2. Apabila skor F hitung t tabel maupun signifikansi > 0.05 sehingga artinya Variabel dependent. independen secara bersama-sama tidak berdampak pada variabel.

Hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua faktor independen secara bersamaan dan substansial mempengaruhi variabel dependen, diterima jika nilai signifikan $F < 0,05$ dalam uji hipotesis menggunakan statistik F (Hamid et al., 2020).

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk memastikan sejauh mana faktor-faktor independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen, digunakan uji koefisien determinasi berganda. Persentase varians pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model penelitian ditunjukkan oleh koefisien determinasi berganda (R^2), yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan program EViews. Angka ini menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap penjelasan variabel dependen, dengan faktor tambahan di luar model penelitian yang memengaruhi bagian yang tersisa (Hamid et al., 2020).

Semakin baik model menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen, semakin tinggi koefisien determinasi (R^2). Di sisi lain, kemampuan model untuk menjelaskan variabel dependen semakin terbatas jika R^2 lebih rendah.

Rentang koefisien determinasi (R^2) adalah 0 hingga 1. Variabel independen dapat secara efektif menjelaskan variabel dependen jika R^2 mendekati 1. Di sisi lain, variabel independen hampir tidak dapat menjelaskan variabel dependen jika R^2 mendekati nol (Hamid et al., 2020).

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berlandaskan temuan studi terkait dampak akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat pada kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, maka bisa diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berdampak positif serta relevan pada kinerja mengelola dana desa. Hal berikut memperlihatkan jika bertambah baik implementasi akuntabilitas, sehingga mengalami peningkatan kinerja mengelola dana desa.
2. Transparansi berdampak positif namun tidak relevan pada kinerja mengelola dana desa. Hal berikut memperlihatkan jika keterbukaan informasi tidak sepenuhnya bisa dalam peningkatan kinerja dengan signifikan.
3. Partisipasi masyarakat berdampak positif namun tidak relevan pada kinerja mengelola dana desa. Hal ini menunjukkan jika keterkaitan masyarakat belum optimal dalam mendukung peningkatan kinerja.
4. Nilai koefisien determinasi menyatakan jika variabel akuntabilitas, transparansi, serta ikut serta masyarakat memiliki kemampuan dalam menguraikan kinerja mengelola dana desa, walaupun masih adanya variabel lain di luar studi yang mempengaruhi.

5.2. KETERBATASAN

1. Keterbatasan Ruang Lingkup Wilayah

Studi berikut hanya dilaksanakan terhadap desa-desa di Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Maka, hasil studi berikut mempunyai keterbatasan dalam hal generalisasi, karena karakteristik setiap desa dapat berbeda, baik dari segi kondisi sosial, ekonomi, maupun tata kelola pemerintahan desa.

2. Keterbatasan Variabel Penelitian

Studi ini hanya meneliti bagaimana kinerja pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh akuntabilitas, keterbukaan, serta keterlibatan masyarakat. Kinerja pengelolaan dana desa mungkin dipengaruhi oleh variabel tambahan yang tidak dibahas pada studi ini, seperti dukungan teknologi informasi, mekanisme pengendalian internal, dan kemampuan sumber daya manusia.

3. Keterbatasan Data Berdasarkan Persepsi Responden

Data yang dipakai pada studi berikut diperoleh melalui kuesioner yang didasarkan pada persepsi responden. Hal ini memungkinkan adanya subjektivitas dalam jawaban responden, sehingga berpotensi menimbulkan bias dalam hasil penelitian.

4. Keterbatasan Pendekatan Penelitian

Studi ini mempergunakan pendekatan kuantitatif, sehingga belum mampu menggambarkan secara mendalam kondisi nyata yang terjadi di lapangan, khususnya terkait dinamika mengelola dana desa serta permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa.

5. Keterbatasan Tingkat Partisipasi dan Pemahaman Responden

Perbedaan tingkat pemahaman responden terhadap mengelola dana desa, terkhususnya mengenai aspek akuntabilitas, transparansi, serta peran serta masyarakat, dapat memengaruhi kualitas jawaban yang diberikan, sehingga berpotensi memengaruhi hasil analisis penelitian.

5.3. SARAN

Berlandaskan temuan studi, penjelasan serta kesimpulan yang didapatkan, sehingga penulis memberikan beberapa saran dibawah ini:

1. Bagi Akademisi

Berkaitan dengan studi terkait akuntabilitas, transparansi, keterlibatan masyarakat, manajemen, distribusi anggaran desa, dan pemberdayaan masyarakat, penelitian ini dapat memperluas fakta mengenai peran pengajaran dan penelitian untuk menjadi referensi tambahan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat meningkatkan penerapan akuntabilitas untuk mengelolakan dana desa melalui pelaporan yang tepat waktu, transparan, serta selaras pada aturan yang ada. Selain itu, perlu dalam peningkatan kualitas transparansi informasi dalam penyediaan akses informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat secara aktif pada setiap proses mengelola dana desa.

3. Bagi Masyarakat

Diinginkan masyarakat bisa dalam peningkatan peran serta pada tahapan merencanakan, melaksanakan, serta pengawasan dana desa agar program yang dijalankan lebih sesuai tujuan serta selaras pada keperluan masyarakat.

4. Bagi Penulis Selanjutnya

Diharapkan mampu menambahkan variabel lain seperti kompetensi aparatur desa, sistem mengendalikan internal, serta mempergunakan teknologi informasi agar dapat memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya. (2022). Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Publik. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Aisyah, & Irham, M. (2022). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa dalam upaya Meningkatkan Pembangunan pada Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(4).
<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v7i4.13808>
- Alqodri, M. (2015). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan, Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Dumai). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 2(2).
- Ardiansyah, M. F., & Umaimah. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah. *JAMMI –Jurnal Akuntansi UMMI*, 3(2), 75–85.
- Ardiyanti, R. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*. UIN Walisongo Semarang.
- Arifin, M., & Hamzah. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Barebo Kabupaten Bone. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(2), 112–125.
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (6th ed.). Rineka Cipta.
- Asrul. (2024). Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penggunaan Dana. *Jurnal Akuntansi Dan*

Tata Kelola Desa.

- Babulu, N. L. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 18–26.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Bintoro, E., Ingga, I., & Hasan, H. S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Kinerja Keuangan Dana Desa. *Management & Accounting Research Journal Global*, 6(2).
- Dewi, D. E., & Priyo, H. A. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Publik*, 3(2), 287–299.
- Dewi, V. S., & Ekadjaja, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(1), 118–126.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jpa.v2i1.7139>
- Edri, O., Yusrawati, & Siska. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagari Kecamatan Lintau Buo Sumatera Barat. *Journal of Islamic Finance and Accounting Research*, 1(2), 1–16.
- Fitriani, Z. (2022). *Analisis Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmes, S. (2010). *Accounting Theory* (7th ed.). Wiley.
- Gujarati, D. N., Porter, D. C., & Gunasekar, S. (2012). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Halim, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*.

Salemba Empat.

- Hamid, M. A., Ramadhani, R., Masrul, Juliana, Safitri, M., Munsarif, M., Jamaludin, & Simarmata, J. (2020). *Media Pembelajaran*. Yayasan Kita Menulis.
- Ishardiyanti, A., Mahmud, & Mauzu, F. (2025). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Teknologi Informasi. *Advances in Management & Financial Reporting*, 3(3), 844–857.
<https://doi.org/https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.612>
- Ismail. (2023). Transparansi Anggaran Desa dan Kinerja Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Pembangunan Daerah*, 11(1).
- Jawa, M. N., Sanga, K. P., & Goo, E. E. K. (2024). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Dobo Nuapu'u Kecamatan Mego. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 1(5), 249–270.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i5.499>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 4(3), 305–360.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kuncoro. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Erlangga.
- Kurniawan, A. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Dana Desa*. Universitas Airlangga.
- Lestari, D. (2023). Implementasi Kebijakan Transparansi Dana Desa di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 45–58.
- Lihawa, N. I., Noholo, S., & Lukum, A. (2025). Pengaruh Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 36–50.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37905/jar.v6i1.148>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.

- Maria, E., & Halim, A. (2021). E-Government Dan Korupsi: Studi Di Pemerintah Daerah, Indonesia Dari Perspektif Teori Keagenan. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 5(1), 40–58.
- McCabe, W. L., Smith, J. C., & Harriott, P. (2005). *Unit Operations of Chemical Engineering* (7th ed.). McGraw-Hill.
- Muksin, A., Runtu, T., & Datu, C. V. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1281–1296.
- Murapi, I., & Astarini, D. A. O. (2025). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Deskriptif Asosiatif. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 9(2), 723–736.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52362/jisamar.v9i2.1851>
- Muttaqin, H. A. (2025). *Persepsi Pengguna Terhadap Kemudahan Dan Keandalan Aplikasi Jogja Smart Service (JSS) Dalam Implementasi E-Government Di Kota Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Natasya, N. A., Desmiyawati, & Anggraini, L. (2022). Analisis Penerapan Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. *Jurnal Al-Iqtishad*, 18(2), 97–113.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jiq.v18i2.17235>
- Nugroho, P. S., Wahyuningsih, P., & Alliyah, S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada 10 Pemerintah Desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara). *JAP: Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1).
- Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. B. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 641–656.

- Nurhayati, N., Purnama, D., & Mustika. (2021). Faktor-faktor Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *JIAFE: Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 7(2).
- Nurlukman, A. D., & Said, F. F. (2019). Dinamika Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Berbasis Prioritas Dalam Penyusunan APBDes. *Journal of Social Politics and Governance*, 1(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24076/JSPG.2019v1i2.186>
- Prasasti, P. F., & Ma'ruf, M. F. (2025). Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Mandiri (Studi Kasus Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12), 598–614.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15699644>
- Prasetyo, D. (2023). Mengoptimalkan Pengelolaan Dana Desa: Tinjauan atas PMK 145 dan 146 Tahun 2023. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 45–58.
- Pratama, A. (2021). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang, Tanggamus)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Purnomo, A., Kanusta, M., Fitriyah, Guntur, M., Siregar, R. A., Ritonga, S., Nasution, S. I., Maulidah, S., & Listantia, N. (2022). *Pengantar model pembelajaran*. Yayasan Hamjah Diha.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Penerbit Gava Media.
- Rahayu, H., & Handayani, N. (2019). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(5).
- Rahman, K. G., & Rahcman, S. H. (2021). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kota Makassar. *Equilibrium*, 2(1), 25–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.37541/eq.v2i1.510>

- Rahmanurrasjid, A. (2008). *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan (Studi di Kabupaten Kebumen) yang Baik di Daerah*. Universitas Diponegoro.
- Razali, N. M., & Wah, Y. B. (2011). Power comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling tests. *Journal of Statistical Modeling and Analytic*, 2(1), 21–33.
- Riduwan. (2020). *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Alfabeta.
- Rosyan, A. N., Rahman, A. Z., & Kismartini. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. *Journal of Management & Public Policy*, 11(1), 37–48.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i1.32906>
- Saifi, M. (2019). Pengaruh Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, 13(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.profit.2019.013.02.1>
- Saragih, T. M. (2011). Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan. *Jurnal Sasi*, 17(3), 11–20.
- Sari, D. (2025). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kepuasan Masyarakat Desa Tiwu Riwung Kecamatan Mbeliling Kabupaten Maggarai Barat. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(1), 2218–2225.
- Sari, N. I., Antong, & Sultan. (2022). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Walenrang Utara. *Jurnal Akuntansi*.
- Sari, Y. P. (2025). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa melalui Partisipasi Masyarakat dengan Relevansi Nilai Syariah di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang*. UIN Jurai Siwo Lampung.

- Scott, W. R. (2011). *Financial Accounting Theory* (6th ed.). Pearson Canada.
- Shidqi, F., & Arfiansyah, Z. (2025). Good governance and corruption in local governments: The role of internal control and audit. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 29(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.iss1.art1>
- Sihotang, A. M., Nasrizal, & Hanif, R. A. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Gaya Kepemimpinan, dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Rakit Kulim dan Kecamatan Lubuk Batu Jaya). *JETBUS Journal of Education Transportation and Business*, 1(2), 691–703.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press.
- Suciana, S., Widiastuti, C. T., & Meiriyanti, R. (2025). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dombo Dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 997–1008.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Supriadin, & Wardan. (2024). Efektivitas pemanfaatan dana desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan. *Economica Insight*, 1(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.71094/ecoin.v1i1.17>
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. UGM Press.
- Suryani, A. (2022). The accountability of village funds and to improve the effectiveness of village programs. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 119–130.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ppd.v10i2.15630>
- Suryantari, Y., Harsasi, M., Riana, K. E., & Akbara, A. Z. (2025). Peningkatan Partisipasi Warga melalui Edukasi dan Penguatan Fasilitas

- Operasional di Bank Sampah Kuntum Mekar Bogor. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 6(403–411).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35311/jmpm.v6i1.558>
- Temalagi, S., Dwianika, A., Oktris, L., & Anasta, L. (2023). *Akuntansi Pajak: Teori, Praktik, dan Implementasi*. Penerbit Salemba.
- Ultafiah, W. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Utami, R. (2024). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*. IAIN Metro.
- Wulandari, A. (2021). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Yanto, E., & Aqfir. (2020). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. *Economy Deposit Journal*, 2(2), 67–76.
- Yudastio, & Azriya, N. (2022). Accountability, Transparency, and Participation in Village Fund Management. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.28997>